

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENINGKATAN GIZI BAYI DAN BALITA OLEH BIDAN
POS KESEHATAN DESA (POSKESDES) DI DESA KIARAPAYUNG
KECAMATAN RANCAH KABUPATEN CIAMIS**

Oleh :

Sri Hernawati

Email : hernawatisri708@gmail.com

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh

Jl. RE Martadinata Nomor 150 Ciamis

Abstrak

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa implementasi program peningkatan gizi bayi dan balita oleh Bidan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) di Desa Kiarapayung Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis belum optimal. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka implementasi program peningkatan gizi bayi dan balita menjadi rumusan masalahnya adalah : 1) Bagaimana implementasi program peningkatan gizi bayi dan balita oleh Bidan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) di Desa Kiarapayung Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis?; 2) hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi program peningkatan gizi bayi dan balita oleh Bidan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) di Desa Kiarapayung Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis?; 3) Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi program peningkatan gizi bayi dan balita oleh Bidan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) di Desa Kiarapayung Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Informan sebanyak 5 orang yang terdiri dari 1 orang Bidan Poskesdes, 2 orang Kader Posyandu, 2 orang Masyarakat. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) dan dokumentasi. Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui pengolahan data hasil wawancara dan observasi untuk ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian bahwa : 1) implementasi program peningkatan gizi bayi dan balita oleh Bidan Poskesdes belum sesuai dengan Pendapat Edward III (Agustino, 2017:136). Begitupula berdasarkan observasi yang dilaksanakan diketahui bahwa ketidaksesuaian tersebut terlihat dari komunikasi yang masih kurang efektif, kurangnya sumber daya manusia, sikap pelaksana belum optimal, dan struktur birokrasi yang masih belum baik menjadi salah satu penyebab kurang optimalnya pelaksanaan program peningkatan gizi bayi dan balita. 2) Adanya hambatan-hambatan dalam implementasi program peningkatan gizi seperti bidan belum melaksanakan tugas dan fungsinya secara bertanggungjawab, keterbatasan sumber daya manusia yang ada, selain itu kurangnya anggaran yang disediakan. 3) Adanya upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi program peningkatan gizi bayi dan balita, bidan melakukan kerjasama dengan kader posyandu, bidan juga sering melakukan pendekatan kepada masyarakat pada saat ada kegiatan posyandu, dan bidan melakukan pelatihan terlebih dahulu dengan kader posyandu sebelum pelaksanaan program gizi bayi dan balita.

Kata Kunci : Implementasi, Program Gizi Bayi dan Balita.

I. PENDAHULUAN

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan

lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan

bagaimana mengantarkan kebijakan secara langsung ke masyarakat.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan yang memerlukan kebijakan publik per jelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Intruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain.

Di Desa Kiarapayung terdapat permasalahan mengenai program peningkatan gizi bayi dan balita, masalah gizi bayi dan balita masih menjadi persoalan utama dalam tatanan kependudukan, salah satunya adalah masalah gizi kurang. Gizi merupakan salah satu pilar pembangunan sosial dan ekonomi, sehingga penurunan gizi kurang pada bayi dan balita sangatlah penting demi mendukung terwujudnya masyarakat yang sejahtera yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai keamanan pangan dan perbaikan gizi.

Studi pendahuluan yang telah dilakukan di Desa Kiarapayung dari informasi yang diperoleh dari Bidan Poskesdes Desa Kiarapayung masalah gizi masih menjadi masalah utama yang perlu ditanggulangi dengan melakukan berbagai upaya baik promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kegiatan tersebut antara lain dengan melaksanakan kegiatan perbaikan gizi di posyandu dengan memantau pertumbuhan dan perkembangan anak, penyuluhan, pemberian paket gizi, intervensi gizi dengan pemberian makanan tambahan, pemantauan status gizi bayi dan balita. Timbulnya masalah gizi dipengaruhi oleh banyak faktor, maka upaya perbaikan gizi masyarakat harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai pihak serta peran aktif dari lintas program dan lintas sektor terkait.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi program tentang pemahaman gizi bayi dan balita di Desa Kiarapayung Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis?
2. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi oleh Bidan Poskesdes dalam implementasi program peningkatan gizi bayi dan balita di Desa Kiarapayung Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis?
3. Upaya-upaya apakah yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di Desa Kiarapayung Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis ?

II. LANDASAN TEORITIS

2.1 Pengertian Implementasi

Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan tentang implementasi, diantara adalah menurut Agustino (2014:138):

Implementasi adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas, lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien.

Sedangkan Widodo (2012:88) Implementasi merupakan: Suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.

Dari beberapa uraian diatas bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

2.2 Implementasi Kebijakan Model George C.Edward III

Menurut Edward III, bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan terdapat empat faktor yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut adalah :

1. Komunikasi

a. Transmisi

Transmisi ditandai dengan sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan harus disalurkan pada pejabat yang akan melaksanakannya.

b. Kejelasan

Kejelasan tujuan dan cara yang akan digunakan dalam sebuah kebijakan merupakan hal yang mutlak agar dapat diimplementasikan sebagaimana yang telah diputuskan.

c. Konsistensi

Implementasi yang efektif selain membutuhkan komunikasi yang jelas, juga yang konsisten.

2. Sumber Daya

Sumber daya yang diperlukan dalam implementasi menurut Edward III, yaitu sebagai berikut:

a. Staf, yang jumlah dan kemampuannya sesuai dengan yang dibutuhkan.

b. Informasi, yaitu berkaitan dengan cara melaksanakan kebijakan dan data yang berkaitan dengan kebijakan yang akan dilaksanakan.

c. Kewenangan. Artinya, kewenangan yang dibutuhkan bagi implementor sangat bervariasi bergantung pada kebijakan yang harus dilaksanakan. Kewenangan dapat berwujud membawa kasus ke meja hijau, menyediakan barang dan jasa, kewenangan untuk memperoleh dan menggunakan dana, kewenangan untuk meminta kerjasama dengan badan pemerintah yang lain, dan lain-lain.

d. Fasilitas. Fasilitas fisik termasuk hal yang penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan oleh para implementor. Fasilitas fisik sebagai sarana dan prasarana pendukung diperlukan untuk memperlancar proses komunikasi kebijakan, tanpa fasilitas fisik yang memadai, implementasi juga

tidak akan efektif, fasilitas fisik ini beragam bergantung pada kebutuhan kebijakan.

3. Disposisi

Disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus dilaksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana-pelaksana yang memiliki hasrat kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Ada tiga unsur utama yang memengaruhi kemampuan dan kemauan aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan, antara lain sebagai berikut:

a. Kognisi, yaitu seberapa jauh pemahaman pelaksana terhadap kebijakan. Arahan dan tanggapan pelaksanaan. Hal ini meliputi penerimaan, ketidakberpihakan ataupun penolakan pelaksana dalam menyikapi kebijaksanaan.

b. Intensitas respons atau tanggapan pelaksana.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan. Ia menekankan perlu adanya *Standart Operating Procedure* (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan diantara para pelaksana, terlebih jika pelaksanaan program melibatkan lebih dari satu institusi. Ia juga mengingatkan bahwa adakalanya fragmentasi diperlukan ketika implementasi kebijakan memerlukan banyak program dan melibatkan banyak institusi untuk mencapai tujuannya.

2.3 Pengertian Program Gizi Bayi Dan Balita

Secara umum program diartikan sebagai unsur pertama yang harus ada demi tercapainya suatu kegiatan. Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan.

Pengertian program menurut Jones (1984) adalah :

Program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan. Dalam pengertian tersebut menggambarkan bahwa program-program adalah penjabaran dari langkah-langkah dalam

mencapai tujuan itu sendiri. Dalam hal ini, program pemerintah berarti upaya untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan. Program-program tersebut muncul dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Sedangkan gizi adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, penyimpanan, metabolisme dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan dan fungsi normal dari organ-organ serta menghasilkan energi.

Bayi merupakan individu yang berusia 0-12 bulan yang ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan yang cepat disertai dengan perubahan dalam kebutuhan zat gizi (Wong, 2013).

Balita merupakan istilah yang berasal dari kependekan kata *bawah lima tahun*. Istilah ini cukup populer dalam program kesehatan. Balita merupakan kelompok usia tersendiri yang menjadi sasaran program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Rentang usia balita dimulai dari satu sampai dengan lima tahun, atau bisa digunakan perhitungan bulan, yaitu usia 12-60 bulan.

2.4 Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Suatu implementasi kebijakan akan menghasilkan keberhasilan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dan kelompok yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Merilee S. Grindle (1980) dalam buku (Anggara, 2014:254) menyatakan bahwa ada dua faktor yang dapat menentukan kegagalan dan keberhasilan dalam implementasi kebijakan yaitu:

1. Isi Kebijakan
Isi kebijakan atau program akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan implementasi, kebijakan kontroversial, kebijakan yang dipandang tidak populis, kebijakan yang menghendaki perubahan besar, akan mendapatkan perlawanan baik dari kelompok sasaran, maupun dari implementornya yang merasa sulit melaksanakan kebijakan tersebut
2. Konteks Implementasi

Konteks implementasi juga akan berpengaruh pada tingkat keberhasilannya karena baik mudahnya kebijakan maupun dukungan kelompok sasaran, hasil implementasinya tetap bergantung pada implementornya.

Sedangkan Menurut Agustino (2017:156) mengemukakan adanya berbagai kondisi yang mengakibatkan satu implementasi kebijakan dikatakan efektif atau tidak, yaitu:

1. Respek anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan pemerintah
Artinya manusia dapat menerima dengan baik hubungan relasional antar individu. Ketika relasi ini berjalan dengan baik, maka logikanya seluruh warga akan saling hormat-menghormati, memberikan respek pada (otoritas) orangtua, memberikan penghargaan yang tinggi pada ilmu dan pengetahuan, menghormati undang-undang yang dibuat oleh pemerintah, mematuhi aturan hukum, mempercayai pejabat-pejabat pemerintah, dan sebagainya.
2. Kesadaran untuk menerima kebijakan
Dalam masyarakat yang digerakkan oleh logika *rational choices* (pilihan-pilihan rasional), banyak dijumpai individu atau kelompok warga yang mau menerima dan melaksanakan kebijakan publik sebagai suatu yang logis, rasional, serta memang dirasa perlu.
3. Ada atau tidaknya sanksi hukum
Faktor penentu lainnya agar implementasi kebijakan dapat berjalan efektif adalah sanksi hukum. Orang akan melaksanakan dan menjalankan suatu kebijakan (kendati dengan perasaan terpaksa) karena mereka takut terkena dampak sanksi hukum yang dijabarkan oleh konten suatu kebijakan seperti denda, kurungan, dan sanksi lainnya.
4. Kepentingan pribadi atau kelompok
Subjek kebijakan (individu atau kelompok) sering memperoleh keuntungan langsung dari suatu pelaksanaan kebijakan. Maka tidak heran apabila efektifitas suatu implementasi kebijakan ikut dipengaruhi oleh penerimaan dan

- dukungan subjek kebijakan atas pelaksanaan suatu kebijakan.
5. Bertentangan dengan sistem nilai yang ada
Implementasi kebijakan pun dapat berjalan tidak efektif apabila bertentangan dengan sistem nilai yang ada di suatu daerah.
 6. Keanggotaan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi
Kepatuhan atau ketidakpatuhan seseorang atau sekelompok orang pada kebijakan dapat disebabkan oleh bergabung atau tidak bergabungnya subjek kebijakan dalam suatu organisasi tertentu atau tidak.
 7. Wujudnya kepatuhan selektif
Tidak semua subjek kebijakan patuh atas aturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini karena ada sebagian besar masyarakat yang patuh pada suatu kebijakan tertentu, tetapi tidak pada kebijakan lain.
 8. Waktu
Efektif tidaknya suatu implementasi kebijakan sangat dipengaruhi juga oleh faktor waktu.
 9. Sosialisasi
Hal berikutnya yang dapat digunakan untuk menilai efektif tidaknya suatu implementasi kebijakan adalah dilaksanakan atau tidaknya sosialisasi. Sosialisasi merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan berbagai hal yang akan dilakukan dan ditempuh oleh pemerintah melalui kebijakan yang diformulasinya, tanpa sosialisasi yang cukup baik, maka tujuan kebijakan bisa jadi tidak tercapai.
 10. Koordinasi antar-lembaga atau antar-organisasi
Implementasi kebijakan tidak jarang melibatkan banyak pemangku kebijakan dan stakeholder. Oleh karena itu, koordinasi merupakan mantra penting dalam menilai keefektifan suatu implementasi kebijakan. Terkadang suatu kebijakan dianggap baik dalam segi konten tapi lemah dalam segi pelaksanaan.

III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sebagaimana yang diungkapkan Nawawi (2006:63) mengemukakan:

“Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya”.

3.2. Waktu dan Tempat Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Kiarapayung Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa lokasi penelitian tersebut merupakan tempat data yang diperlukan sehingga lebih memudahkan dalam pelaksanaan penelitian.

Lamanya penelitian yang diperlukan oleh penulis kurang lebih 9 (sembilan) bulan, terhitung dari bulan November 2018 sampai dengan bulan Juli 2019, dimulai dari tahap peninjauan, pelaksanaan penelitian sampai dengan penyusunan jurnal.

3.3. Subjek Penelitian

Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari:

1. Bidan Poskesdes Desa Kiarapayung sebanyak 1 (satu) orang.
2. Kader Posyandu Desa Kiarapayung sebanyak 2 (dua) orang.
3. Masyarakat Desa Kiarapayung sebanyak 2 (dua) orang.

3.4. Prosedur

Dalam penelitian ini langkah penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan indikator-indikator melalui teori ahli sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian. Teori yang dijadikan acuan adalah teori implementasi dari Edward III dalam (Agustino, 2017:136), yang kemudian disesuaikan dengan keadaan lokasi penelitian tersebut.

3.5. Data, instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Dengan demikian data dalam penelitian ini yaitu mengenai implementasi program peningkatan gizi bayi dan balita oleh Bidan Poskesdes di Desa Kiarapayung Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari hasil observasi di Desa Kiarapayung, dan wawancara terhadap informan yang meliputi Bidan Poskesdes sebanyak 1 (satu) orang, Kader Posyandu sebanyak 2 (dua) orang, dan Masyarakat sebanyak 2 (dua) orang. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dari judul penelitian seperti buku-buku tentang implementasi dan program, dokumen atau data-data dari poksesdes Desa Kiarapayung dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan dan studi lapangan.

3.6. Teknis Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Redaksi Data
Redaksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.
2. Penyajian Data
Penyajian data digunakan untuk menyajikan data kedalam matriks-matriks yang sesuai dengan keadaan data, agar data tidak tertumpuk dan peneliti dapat menguasai data.
3. Pengambilan Kesimpulan
Pengambilan kesimpulan yang dilakukan dengan cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan sehingga data-data yang ada telah diuji validasinya. Dengan demikian terdapat kesimpulan yang jelas kebenarannya dan kegunaannya.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Program Peningkatan Gizi Bayi dan Balita Oleh Bidan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) di Desa

Kiarapayung Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis.

1. Komunikasi

Untuk mengetahui implementasi program peningkatan gizi bayi dan balita oleh Bidan Poskesdes di Desa Kiarapayung Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis, maka penulis melakukan hasil pembahasan dari hasil penelitian berdasarkan masing-masing dimensi, untuk dimensi komunikasi, penulis menguraikan ke dalam 3 (tiga) indikator yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya transmisi atau penyaluran komunikasi dalam melaksanakan program peningkatan gizi bayi dan balita.
- b. Adanya kejelasan dalam mengimplementasikan kebijakan mengenai program peningkatan gizi bayi dan balita.
- c. Adanya konsistensi mengenai waktu pelaksanaan dalam mengimplementasikan kebijakan mengenai program peningkatan gizi bayi dan balita.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa implementasi program peningkatan gizi bayi dan balita oleh Bidan Poskesdes di Desa Kiarapayung Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis dalam dimensi komunikasi sudah berjalan namun belum efektif.

Hal ini tidak sejalan dengan pendapat Edward III (Agustino, 2017, 137), Komunikasi menurutnya, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau penstransmision informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan di dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Berkaitan dengan teori di atas, penulis berpendapat bahwa untuk mencapai keberhasilan

dalam implementasi kebijakan hal yang harus dilakukan yaitu dengan adanya penyaluran komunikasi serta faktor pendukung keberhasilan implementasi seperti partisipasi dari masyarakat.

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian dan teori diatas, diketahui bahwa implementasi program peningkatan gizi bayi dan balita oleh Bidan Poskesdes di Desa Kiarapayung Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis dalam dimensi komunikasi masih kurang baik, dikarenakan kurangnya kerjasama antara bidan dengan petugas yang lainnya, dan dalam kejelasan program gizi bayi dan balita masih kurang jelas dikarenakan dalam setahun ini program gizi tidak berjalan, biasanya program gizi bayi dan balita dilakukan selama 6 bulan sekali, dalam konsistensi waktu pelaksanaan belum konsisten karena akhir-akhir ini penyuluhan program gizi tidak dilakukan. Dalam dimensi komunikasi ini dapat dikatakan sudah berjalan tetapi belum efektif.

2. Sumber Daya

Untuk mengetahui implementasi program peningkatan gizi bayi dan balita oleh Bidan Poskesdes di Desa Kiarapayung Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis, maka penulis melakukan hasil pembahasan dari hasil penelitian berdasarkan masing-masing dimensi, untuk dimensi sumber daya, penulis menguraikan ke dalam 4 (empat) indikator yaitu sebagai berikut:

- a. Tersedianya staff atau bidan poskesdes yang berkompeten dalam melaksanakan program peningkatan gizi bayi dan balita.
- b. Adanya informasi data tentang program peningkatan gizi bayi dan balita
- c. Adanya wewenang dalam menggunakan dana pada program peningkatan gizi bayi dan balita.
- d. Adanya sarana dan prasarana yang memadai dalam melaksanakan program peningkatan gizi bayi dan balita.

Seperti yang dikemukakan oleh Edward III (Agustino, 2012 149-153) bahwa indikator sumberdaya terdiri dari beberapa elemen salah satunya yaitu:

Staf, merupakan sumber daya utama dalam implementasi kebijakan publik. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan publik salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Diperlukan kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan publik atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

Berkaitan dengan teori di atas, penulis berpendapat bahwa untuk mencapai keberhasilan akan dapat tercapai apabila salah satunya didukung dengan adanya sumberdaya manusia yang berkompeten dibidangnya, tetapi apabila sebaliknya maka keberhasilan dalam implementasi kebijakan akan susah untuk dicapai.

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian dan teori diatas, diketahui bahwa implementasi program peningkatan gizi bayi dan balita oleh Bidan Poskesdes di Desa Kiarapayung Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis dalam dimensi sumber daya masih kurang baik, dalam penyediaan staf masih kurang tercukupi karena masih kurangnya petugas pelaksanaan, dalam informasi data masih belum efektif dikarenakan bidan tidak selalu memberikan data kepada masyarakat, dan mengenai wewenang penggunaan dana dapat dikatakan baik karena dalam program tersebut tidak ada pendaan atau pungutan biaya apapun sehingga akan meringankan kepada masyarakat, mengenai sarana dan prasarana masih belum memadai karena masih kurang peralatan yang lainnya seperti kursi dan ruangan yang kurang nyaman untuk masyarakat ibu-ibu bayi.

3. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Untuk mengetahui implementasi program peningkatan gizi bayi dan balita oleh Bidan Poskesdes di Desa Kiarapayung Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis, maka penulis melakukan hasil pembahasan dari hasil penelitian berdasarkan masing-masing dimensi, untuk dimensi disposisi atau sikap pelaksana, penulis menguraikan ke dalam 3 (tiga) indikator yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya sikap kognisi atau pemahaman pelaksana dalam mengimplementasikan program peningkatan gizi bayi dan balita.
- b. Adanya arahan atau tanggapan dalam melaksanakan program peningkatan gizi bayi dan balita.
- c. Adanya respon atau tanggapan dalam pelaksanaan mengenai program peningkatan gizi bayi dan balita.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa implementasi program peningkatan gizi bayi dan balita oleh Bidan Poskesdes di Desa Kiarapayung Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis dalam dimensi disposisi atau sikap pelaksana belum baik.

Seperti yang dikemukakan oleh Edward III (Anggara, 2014:253).

Disposisi adalah sikap komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus dilaksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana-pelaksana yang memiliki hasrat kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan.

Berkaitan dengan teori di atas, penulis berpendapat bahwa dalam mencapai keberhasilan implementasi selain faktor internal dan eksternal seperti halnya diperlukan sikap dari implementator seperti komitmen, kesungguhan, dan kejujuran sangat berpengaruh dalam proses implementasi kebijakan maka dari itu implementator haruslah memiliki sikap yang baik agar implementasi kebijakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian dan teori diatas, diketahui bahwa implementasi program peningkatan gizi bayi dan balita oleh Bidan Poskesdes di Desa Kiarapayung Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis dalam dimensi disposisi atau sikap pelaksana masih kurang optimal, terlihat dari kedisiplinan, kurangnya dalam kesungguhan pegawai yang kadang datang terlambat pada saat pelaksanaan program gizi bayi dan balita, sehingga membuat masyarakat kebingungan pada saat akan melaksanakan kegiatan, dalam arahan respon dan tanggapan dari masyarakat sangat baik, pihak puskesmas juga memberikan arahan dan motivasi kepada masyarakat.

4. Struktur Birokrasi

Untuk mengetahui implementasi program peningkatan gizi bayi dan balita oleh Bidan Poskesdes di Desa Kiarapayung Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis, maka penulis melakukan hasil pembahasan dari hasil penelitian berdasarkan masing-masing dimensi, untuk dimensi struktur birokrasi, penulis menguraikan ke dalam 2 (dua) indikator yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya Standar Operasional (SOP) dalam program peningkatan gizi bayi dan balita.
- b. Adanya pembagian tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan program peningkatan gizi bayi dan balita.

Seperti yang dikemukakan oleh Siagian (Tachjan, 2006, 27-28) bahwa unsur pelaksana bertugas:

Berdasarkan otoritas dan kapasitas administratif yang memiliki unit birokrasi maka ia melakukan berbagai tindakan, mulai dari penentuan tujuan dan sasaran, analisis serta perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakan manusia, pelaksanaan kegiatan operasional, pengawasan, penilaian program.

Berkaitan dengan teori di atas, penulis berpendapat bahwa dalam pelaksanaan program adanya keterlibatan birokrasi mulai dari pelaksana sebuah program sampai dengan pengawasan terhadap pelaksanaan melalui adanya pembagian kerja antara pelaksana dengan birokrasi sebagai salah satu faktor pendukung dalam keberhasilan implementasi serta adanya fungsi pengawasan terhadap program yang dijalankan dan transparansi kepada masyarakat selaku sasaran dari kebijakan yang dibuat oleh implementator itu sendiri.

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian dan teori diatas, diketahui bahwa implementasi program peningkatan gizi bayi dan balita oleh Bidan Poskesdes di Desa Kiarapayung Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis dalam dimensi struktur birokrasi masih kurang optimal, terlihat dari kurangnya transparansi serta pembagian kerja yang kurang

berjalan dengan baik. Mengenai standar operasional bidang puskesmas kurang kerjasama dengan pihak puskesmas mengenai standar yang harus dicapai dalam melaksanakan program gizi bayi dan balita.

4.2 Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Oleh Poskesdes Desa Kiarapayung Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis Dalam Melakukan Peningkatan Gizi Bayi Dan Balita.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu pendukung keberhasilan implementasi kebijakan maka dari itu perlu adanya penyaluran komunikasi yang baik, jelas serta konsisten agar proses implementasi berjalan lancar.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh dari 5 informan bahwa untuk dimensi komunikasi, bidan poskesdes melakukan komunikasi berupa penyuluhan terhadap program peningkatan gizi bayi dan balita.

Dalam dimensi komunikasi terdapat hambatan, terlihat dari tidak adanya penyuluhan mengenai program peningkatan gizi bayi dan balita. Seperti yang dikemukakan oleh Edward III (Agustino, 2012:149-153) yaitu indikator yang dapat mengukur keberhasilan variabel komunikasi, seperti:

Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan teori di atas komunikasi yang disampaikan haruslah jelas supaya informasi yang disampaikan tersebut dapat dipahami dan mencapai sasaran sesuai dengan tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan dan setidaknya dengan hal tersebut bisa memperkecil hambatan yang nantinya akan timbul.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan bahwa dalam implementasi program peningkatan gizi bayi dan balita dalam dimensi komunikasi, masih terdapat hambatan seperti tidak adanya penyuluhan, apabila melakukan penyuluhan pun masyarakat tidak aktif dalam berkomunikasi disebabkan masyarakat menganggap tidak penting pada program peningkatan gizi bayi dan balita. Jadi pada intinya diperoleh gambaran bahwa implementasi program peningkatan gizi bayi dan balita oleh Bidan Poskesdes di Desa Kiarapayung Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis mengenai dimensi komunikasi masih ditemukan adanya hambatan khususnya terkait masalah penyuluhan yang sudah tidak dilakukan.

2. Sumber Daya

Dalam implementasi kebijakan sumberdaya merupakan unsur yang sangat penting, karena dengan adanya sumberdaya akan memberikan kelancaran dalam pelaksanaan dilapangan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh informasi mengenai dimensi sumberdaya terkait masih kurangnya pegawai, jumlah pegawai yang belum cukup, fasilitas yang kurang memadai, dan terkait kemampuan tenaga kesehatan sebanyak 5 informan menjawab, kemampuan yang dimiliki pegawai bisa terbilang kurang mampu sebab bidan masih memerlukan asisten bidan untuk membantu semua kegiatan poskesdes terutama pada program peningkatan gizi bayi dan balita.

Dikemukakan oleh Edward III (Agustino, 2012:149-153) Untuk memudahkan dalam pencapaian implementasi kebijakan perlu didukung dengan adanya sumber daya yang memadai salah satunya yaitu:

Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Dalam implementasi kebijakan bila dikaitkan dengan teori bahwa faktor-faktor

pendukung keberhasilan implementasi salah satunya sumber daya yang memadai seperti adanya fasilitas, staf yang mencukupi serta berkompeten dan sarana prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan hal di atas penulis berpendapat bahwa selain didukung dengan adanya staf yang berkompeten, tetap saja implementasi tidak akan berjalan secara optimal tanpa adanya fasilitas pendukung yang memadai.

Berdasarkan hasil observasi, maka dapat diperoleh gambaran bahwa implementasi program peningkatan gizi bayi dan balita oleh Bidan Poskesdes di Desa Kiarapayung Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis mengenai sumber daya khususnya dalam peralatan, kemampuan dan fasilitas masih terdapat hambatan seperti keterbatasan peralatan, fasilitas seperti ruangan dan kursi dan peralatan kesehatan yang lainnya kurang memadai atau kurang tersedia.

3. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai dimensi disposisi, diperoleh informasi bahwa, sebanyak 5 informan menjawab mengenai indikator sikap, arahan atau tanggapan, respon dan tanggapan, dalam peningkatan program peningkatan gizi bayi dan balita sudah cukup baik terlihat dari bidan yang memberikan arahan dan respon dengan sikap yang baik kepada masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier (Agustino, 2012:144) bahwa yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan salah satunya yaitu:

Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat perubahan-perubahan yang hendak dicapai oleh suatu kebijakan publik akan sangat berhasil apabila di tingkat masyarakat,

warga memiliki sumber-sumber dan sikap-sikap masyarakat yang kondusif terhadap kebijakan yang ditawarkan pada mereka.

Berkaitan dengan teori diatas penulis berpendapat bahwa dalam mencapai keberhasilan implementasi selain faktor internal dan eksternal seperti halnya di perlukan sikap dari implementator seperti kesungguhan, komitmen, dan kejujuran sangat berpengaruh dalam proses implementasi kebijakan maka dari itu implementator haruslah memiliki sikap yang baik agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan yang diharapkan.

Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi terkait dimensi disposisi kurang optimal, seperti kurangnya kesungguhan pegawai, terlihat dari penyuluhan program gizi bidan kurang memperhatikan masyarakat sehingga masyarakat enggan untuk mengikuti kegiatan puskesmas terutama pada program peningkatan gizi bayi dan balita, mengenai arahan dan respon dari masyarakat sudah baik apabila program peningkatan gizi bayi dan balita dilakukan dengan rutin seperti biasanya.

4. Struktur Birokrasi

Yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik salah satunya adalah struktur birokrasi, walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengenai apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh informasi mengenai dimensi struktur birokrasi bahwa, sebanyak 5 informan menjawab tidak adanya standar yang harus dicapai dalam program peningkatan gizi bayi dan balita, mengenai pembagian tugas dan tanggungjawab bidan puskesmas membagi-bagi tugas kepada masing-masing kader posyandu.

Kebijakan begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebarkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi

sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik serta pengawasan.

Seperti yang dikemukakan oleh Siagian (Tachjan, 2006:27-26) bahwa unsur pelaksana bertugas :

Berdasarkan otoritas dan kapasitas administratif yang memiliki unit birokrasi maka ia melakukan berbagai tindakan, mulai dari penentuan tujuan dan sasaran, analisis serta perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakan manusia, pelaksanaan kegiatan operasional, pengawasan, penilaian program.

Berkaitan dengan teori di atas, penulis berpendapat bahwa dalam pelaksanaan program adanya keterlibatan birokrasi mulai dari pelaksana sebuah program sampai dengan pengawasan terhadap pelaksanaan melalui adanya pembagian kerja antara pelaksana dengan birokrasi sebagai salah satu faktor pendukung dalam keberhasilan implementasi serta adanya fungsi pengawasan terhadap program yang dijalankan dan transparansi kepada masyarakat selaku sasaran dari kebijakan yang dibuat oleh implementator itu sendiri.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan implementasi program peningkatan gizi bayi dan balita sudah berjalan namun belum optimal terlihat dari kurangnya transparansi serta tidak adanya standar yang harus dicapai dan tidak ada buku panduan program gizi untuk masyarakat, disebabkan karena kurangnya komunikasi dan koordinasi antara bidan dengan masyarakat.

4.3 Upaya-Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Yang Dihadapi Poskesdes Desa Kiarapayung Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis Dalam Melakukan Peningkatan Gizi Bayi Dan Balita.

1. Komunikasi

Penyaluran komunikasi merupakan salah satu unsur pendukung implementasi kebijakan sebab tanpa adanya komunikasi yang baik dikhawatirkan adanya miskomunikasi antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan maka dalam hal ini perlu adanya konsistensi serta kejelasan dalam komunikasi.

Seperti yang dikemukakan oleh Edward III (Agustino, 2012:149-153) bahwa indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan faktor komunikasi, yaitu Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Berdasarkan hal di atas upaya untuk mengatasi hambatan dalam implementasi program peningkatan gizi bayi dan balita di Desa Kiarapayung Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis harus adanya konsistensi dalam komunikasi serta kejelasan pelaksana kebijakan dilapangan sehingga kebijakan itu bisa sesuai dengan sasaran sehingga akan mendapatkan dukungan dari sasaran kebijakan itu sendiri yaitu masyarakat.

Terkait hal tersebut dapat diperoleh gambaran berdasarkan hasil observasi bahwa dalam dimensi komunikasi masih terdapat hambatan sehingga diperlukan adanya upaya yang dilakukan oleh bidan Poskesdes yaitu terkait hambatan dalam penyuluhan hambatannya penyuluhan dalam setahun itu tidak dilakukan akibat kurangnya informasi dari pihak poskesdes, kurangnya konsistensi dalam waktu pelaksanaan, adapun upaya yang harus dilakukan yaitu dengan bidan melakukan kerjasama dengan kader posyandu, bidan juga sering melakukan pendekatan-pendekatan dengan masyarakat pada saat kegiatan posyandu mengajak untuk mengikuti kegiatan puskesmas terutama pada program gizi bayi dan balita.

2. Sumber daya

Dalam proses implementasi kebijakan sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting karena sumber daya manusia yang merupakan unsur pelaksana atau aktor dalam implementasi kebijakan serta didukung dengan sumberdaya-sumberdaya lainnya sebagai pelengkap serta memudahkan dalam proses implementasi kebijakan, selain itu sumberdaya yang adapun harus berkompeten serta memiliki kemampuan dalam setiap bidangnya ataupun pekerjaannya.

Seperti yang dikemukakan oleh Grindle (Agustino, 2012:154-156) pengukuran keberhasilan implementasi yaitu: 'Resources committed (sumber-sumber daya yang

digunakan) Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumberdaya-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik’.

Berkaitan dengan teori di atas, dalam implementasi kebijakan tidak akan terlepas dari yang namanya hambatan maka dari itu untuk mengatasi hambatan dalam dimensi sumber daya maka perlu adanya upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dengan adanya sumber daya-sumber daya yang memadai, baik itu dari segi peralatan yang lengkap, fasilitas yang kurang lengkap seta terpelihara dan juga kemampuan dari pegawai kesehatan itu sendiri selaku agen pelaksana kebijakan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan diperoleh bahwa dalam dimensi sumber daya masih terdapat hambatan sehingga perlu adanya upaya yang dilakukan guna mengatasi hambatan tersebut, upaya untuk mengatasi hambatan terkait belum tersedianya staf yang berkompeten dengan melakukan upaya dengan cara bidan meminta bantuan kepada kader posyandu, hambatan mengenai sarana dan prasarana yang kurang memadai, upaya yang dilakukannya untuk mengatasi hambatan yaitu dengan cara bidan puskesmas melaksanakan kegiatan dengan menggunakan ruangan seadanya atau memakai ruangan aula di Desa Kiarapayung.

3. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Disposisi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik, jika pelaksanaan suatu kebijakan publik ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang harus dikerjakan serta harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.

Dikemukakan oleh Edward III (Sahya Anggara, 2014:253) hal-hal penting yang harus dicermati dalam faktor disposisi salah satunya adalah:

Kognisi, yaitu seberapa jauh pemahaman pelaksanaan terhadap kebijakan. Pemahaman terhadap tujuan kebijakan sangat penting bagi aparat pelaksana. Apabila sistem nilai pembuat kebijakan, implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif. Ketidakmampuan administratif dari

pelaksana kebijakan, yaitu ketidakmampuan dalam menanggapi kebutuhan dan harapan yang disampaikan oleh masyarakat dapat menyebabkan pelaksanaan suatu program tidak efektif.

Berdasarkan teori diatas bila dikaitkan dengan hambatan maka upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kesungguhan pegawai yaitu dengan adanya sikap kognisi memiliki pemahaman yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan.

Berdasarkan hasil observasi diperoleh gambaran bahwa implementasi program peningkatan gizi bayi dan balita oleh Bidan Poskesdes di Desa Kiarapayung Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis khususnya mengenai upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi hambatan karena kurangnya kesungguhan pegawai dalam melaksanakan tugasnya agar lebih disiplin yaitu dengan adanya sikap kognisi agar sikap tersebut dimiliki oleh setiap pegawai dengan melakukan pelatihan terlebih dahulu supaya melaksanakan tugasnya dengan baik.

4. Struktur Birokrasi

Dalam proses implementasi kebijakan birokrasi akan selalu dilibatkan karena merupakan unsur pelaksana mulai dari penentuan sasaran dan tujuan, analisis perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, perencanaan penyusunan program, pengorganisasian, penggerakan manusia, pelaksanaan kegiatan, pengawasan serta penilaian program.

Seperti yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier (Agustino:2012:144),

Keberagaman perilaku yang diatur semakin beragam perilaku yang diatur, maka asumsinya semakin beragam pelayanan yang diberikan, sehingga semakin sulit untuk membuat peraturan yang tegas dan jelas. Dengan demikian semakin besar keterbatasan bertindak yang harus dikontrol oleh para pejabat pada pelaksana (administrator atau birokrat) di lapangan.

Penyelenggara program bila dikaitkan dengan teori, bahwa struktur birokrasi merupakan salah satu faktor pendukung untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan,

akan tetapi apabila struktur birokrasi itu lemah maka harapan untuk mencapai keberhasilan implementasi itu tidak terlalu besar, maka dari itu birokrasi selain pembuat kebijakan merangkap juga sebagai agen pengontrol. Sehingga apabila ada penyalahgunaan tugas maka ada juga pihak yang bertugas sebagai pengontrol.

Hasil observasi menunjukkan bahwa mengenai upaya-upaya yang mestinya dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam implementasi program peningkatan gizi bayi dan balita oleh Bidan Poskesdes di Desa Kiarapayung Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis terkait struktur birokrasi dengan cara bidan memberikan buku panduan atau standar yang harus dicapai kepada masyarakat mengenai program peningkatan gizi bayi dan balita, serta memberikan pemahaman atau komunikasi terkait pembagian tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada kader posyandu, Komunikasi ini dilakukan di luar mekanisme yang ada, dengan maksud untuk mengetahui informasi lebih awal yang berhubungan dengan pelaksanaan Program Peningkatan Gizi Bayi dan Balita

V KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti baik melalui wawancara maupun observasi, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Program Peningkatan Gizi Bayi dan Balita oleh Bidan Poskesdes di Desa Kiarapayung Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis sudah dilaksanakan tetapi dalam pelaksanaannya masih belum optimal. Hasil yang dihadapi bidan Poskesdes saat melakukan program tersebut berupa penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Bidan Poskesdes yaitu: kurangnya

kerjasama antara bidan dengan masyarakat, kurangnya sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, kurangnya kesungguhan pegawai dalam melaksanakan tugasnya, dan tidak adanya standar sebagai acuan untuk pencapaian bidan Poskesdes.

3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Bidan Poskesdes yaitu: Melakukan kerjasama dengan kader posyandu juga dengan pihak puskesmas, bidan melakukan pendekatan-pendekatan dengan masyarakat, bidan melakukan pelatihan mengenai pelaksanaan program gizi bayi dan balita agar mendapatkan hasil yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

a. Sumber Dari Buku

- Abdul Wahab, Solichin. (2017). *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. (2006). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta
- Agustino, Leo. (2007). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Agustino, 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bndung: ALFABETA.
- Idrus Muhammad. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Eirlangga
- Moleong, M.A Prof.Dr. Ilexy. (2014) *Metodologi penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja rosdakarya
- Sahya, Anggara, M.Si.Dr. (2014). *Kebijakan publik*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Susilowati, dan Kuspriyanto S,KM.,M.KM (2016). *GIZI dalam DAUR KEHIDUPAN*. Bandung: PT Refika Aditama
- Tachjan 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI
- Tahir, Arifin, M.Si.Dr. (2014). *Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*. Bandung: CV Alfabeta.